

OLIGARCHY & SOCIAL MOVEMENT DALAM PEMBANGUNAN CENTREPOINT OF INDONESIA (CPI) DI KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN

oleh

Muhammad Iqbal M
20/466913/PSP/07058

INTISARI

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana relasi antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan *Centrepoint of Indonesia* (CPI) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap siapa aktor yang memotori gerakan sosial, menjabarkan tahapan-tahapan dalam gerakan sosial, serta menghasilkan *framework* gerakan sosial yang efektif dan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat sipil tidak terjebak dengan aktivisme yang berkepanjangan. Rencana Pembangunan *Centrepoint of Indonesia* (CPI) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong lahirnya gerakan sosial yang sangat masif dari berbagai kelompok masyarakat sipil di Kota Makassar. Gerakan sosial tersebut dimulai saat Pemerintah mengusir 43 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami Kawasan Delta di Pesisir Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan yang secara langsung berada di zona pembangunan *Centrepoint of Indonesia* (CPI). Setelah itu, masyarakat sipil berkumpul untuk menyatukan visi hingga akhirnya membentuk Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) untuk melawan rencana yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan kurun waktu 3 bulan, terhitung sejak September 2022 hingga November 2022 dengan mewawancarai informan dari unsur Pemerintah, Swasta, dan 16 Masyarakat Sipil. Penelitian ini berhasil menggali keterangan dari masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) maupun yang bergerak secara independen. Temuan dalam penelitian ini yaitu kuatnya pengaruh dinasti politik Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, kepentingan oligarki di pesisir kota Makassar yang mendorong lahirnya pertarungan elit politik dalam memperebutkan pucuk pimpinan Partai Golkar hingga pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) merupakan aktor utama dalam gerakan sosial tersebut, serta metode yang digunakan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) dalam melakukan gerakan sosial di Kota Makassar. Selain itu, gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil mampu menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat sangat kuat dan masif, melibatkan masyarakat akar rumput, menggeser alokasi tambang pasir laut, hingga memaksa Investor dan Pemerintah untuk merubah master plan Pembangunan *Centrepoint of Indonesia* (CPI).

Kata Kunci: Oligarki, Gerakan Sosial, Pemerintah, Masyarakat Sipil, Unjuk Rasa

OLIGARCHY & SOCIAL MOVEMENT ON THE DEVELOPMENT OF CENTREPOINT OF INDONESIA (CPI) IN MAKASSAR CITY, SOUTH SULAWESI PROVINCE

by

Muhammad Iqbal M
20/466913/PSP/07058

ABSTRACT

This research will describe how the relations between Investors, Government, and Civil Society in the development of Centrepont of Indonesia (CPI) in Makassar city, South Sulawesi Province. This research also aims to reveal who the actors driving the social movement, outline the stages in the social movement, and produce an effective social movement framework that empowers the community so that civil society is not trapped in prolonged activism. The development plan of Centrepont of Indonesia (CPI) initiated by the Government of South Sulawesi Province has driven a massive social movement among various civil society groups in the city of Makassar. The social movement began when the Government evicted 43 households living in the Delta area along the Losari Beach coast in Makassar, South Sulawesi, which was directly in the development zone of Centrepont of Indonesia (CPI). After that, civil society gathered to unite their vision and eventually formed the Coastal Rescue Alliance (ASP) to fight against the plan put forward by the South Sulawesi Provincial Government.

This research utilized a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out over a period of 3 months, from September 2022 to November 2022, by conducting interviews with informants from the Government, Private Sector, and 16 Civil Society organizations. This research successfully obtained information from civil society members who are affiliated with the Coastal Rescue Alliance (ASP) as well as those who operate independently. The findings of this research are the strong influence of the Yasin Limpo political dynasty in South Sulawesi, the interests of the oligarchy in the coastal city of Makassar that led to the emergence of political elite struggles to compete for the leadership of the Golkar Party and the 2013 South Sulawesi Governor election. The Coastal Rescue Alliance (ASP) was the main actor in the social movement, and the methods used by the Coastal Rescue Alliance (ASP) in conducting social movements in the city of Makassar. In addition, the social movement carried out by civil society demonstrated that community resistance was very strong and massive, involving grassroots communities in shifting the allocation of sea sand mining and forcing investors and the government to change the master plan for the Centrepont of Indonesia (CPI) development.

Keywords: Oligarchy, Social Movement, Government, Civil Society, Protest